

**LAPORAN SEKTOR Badan Kepegawaian Daerah Juni 2018 SKPD BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

NO	NAMA	LAPORAN	WAKTU	TANGGAPAN	STATUS
27	Hery SA (08224xxxxxxx)	Yth. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mohon salinan Surat Gubernur Jawa Tengah turunan dari SKB Menteri Cuti Bersama 2018 sebagai dasar cuti bersama lebaran 2018 bagi ASN, PPNPN, PTT, THL, Tenaga Pendukung di bawah Pemprov Jateng dapat dikirim ke Kabupaten/Kota. Terima kasih.	02-06-2018 17:12	Terimakasih Mas Brow.... Laporannya diteruskan ke bidang yang menangani Njih... Terimakasih masukannya, surat Gubernur tersebut yang menerbitkan adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Prov. Jateng Terimakasih	Laporan Selesai
28	smslaporgub (+6283xxxxxxx)	Maaf Bapak, mau bertanya, setelah lebaran th 2017 gaji pns dipotong tiap bulan 2,5 untuk zakat fitrah, .....saya yg biasa membagi zakat fitrah dan mall sendiri jadi bingung, apakah orang orang yg biasa saya beri, saya arahkan ke BAI, ? trimakasih bapak.	04-06-2018 10:30	Njih Terimakasih Laporannya diteruskan ke bidang yang menangani Maksudnya bagaimana? Pemotongan Gaji harus ada dasar hukumnya yang jelas, jadi tidak sembarangan memotong gaji, terimakasih	Laporan Selesai
29	H RIYANTO (08132xxxxxxx)	Pak Gub, tolong BKD Propinsi dibina. Klien saya Drs H. Margunanto, KS SMAN Buluspesantren Kebumen. memasuki Pensiun tmt 1 Mei 2018,sampai sekarang belum menerima SK Pensiun tapi sudah diterbitkan SK Plt ks yang baru. apakah BKD Prop tidak memiliki data pegawai yang memasuki BUP ? BKD Prop bekerja tidak profesional padahal Gubernurnya tegas dan cerdas idola rakyat Jateng. Kami Pendukung P Ganjar Yasin	04-06-2018 18:58	Njih Terimakasih Informasinya Diteruskan ke bidang yang menangani Terimakasih, Dapat kami Informasikan sbb: 1. SK Pensiun terlambat karena pengusulannya yg terlambat, karena baru diusulkan 31 Januari 2018, seharusnya 1 (satu) tahun sebelumnya harus diusulkan karena prosesnya sampai ke Jakarta. 2. Penunjukan Plt tidak terkait dengan SK Pensiun sdh terbit atau belum, tp masa berakhir dari Tmt Pensiun KS shg harus segera ditunjuk Penggantinya (PLT) shg proses tidak terganggu. 3. Usulan pensiun dari Dinas Pendidikan yang dimulai dari satuan terkecil dibawahnya mengusulkan (sekolah) (Jadi diusulkan) 4. Terkait SK Pensiun YBS setelah ditelusuri hari ini sudah jadi dan dalam perjalanan ke Semarang (BKD) Jateng. 5. setelah sampai ke BKD jateng akan diteruskan ke dinas Pendidikan untuk proses selanjutnya (Proses di BKD selesai) Demikian penjelasan kami, terimakasih	Laporan Selesai

30	smslaporgub (+6285xxxxxxx)	Aslmkm, pa gu bernur ganjar, gmana pa nasib kmi phl ppa plus psda, knpa gak dpt thr Tiap thun,	08-06-2018 08:08	Njih Mas diteruskan ke Dinas PU SDA & Tata Ruang njih Hasil Koordinasi dengan dinas PSDA disampaikan bahwa: 1. Anggarannya hanya untuk 10 Bulan 2. Aturannya belum memungkinkan demikian ..Terimakasih	Laporan Selesai
31	Adi wibowo (08565xxxxxxx)	Mengeluh, Pekerja Harian Lepas (phl) bidang kebersihan pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Purworejo tidak ada libur lebaran. Setiap hari tetap masuk kerja. Kalo tahun" sebelumnya memang tetap masuk kerja dengan diberikan uang lembur selama 5 hari kerja. Lebaran tahun ini tidak ada lembur sedangkan pekerja PNS kebersihan pertamanan libur sejak tanggal 11 - 20 juni. Terimakasih	09-06-2018 08:02	Njih Kita koordinasikan dengan Kab Purworejo Njih Berikut hasil Koordinasi dengan BKD Kab Purworejo dari BLH Kab Purworejo: Bahwa phl adalah pegawai harian lepas yg di berikan upah/gaji oh (orang harian) sehingga apabila tidak masuk kerja tidak mendapatkan upah/gaji.selama lebaran phl masuk kerja mendapatkan upah/gaji tetapi tidak mendapatkan uang lembur karena sesuai ketentuan keuangan mulai th 2018 pns maupun phl tidak diberi uang lembur jika jam kerja melebihi ketentuan namun phl tetap diberi jatah libur 2 hari dalam 1 bulan demikian.maturnuwun	Laporan Selesai
32	smslaporgub (+6281xxxxxxx)	Assalamualaikum pak ganjar, sya ingin curhat dan bertanya. Di sini kab kami PNS beramai2 tersenyum lebar mendpatkan gaji 13 dan 14 serta sertifikasi. Kenapa bagi yg wb tdk dpt apa2? Uang insentif pun jg entah di mana. Pdahal di kab semarang, insentif wb itu cair. Kenapa utk yg kab kami idem gak ada apa2? PNS makin makmur, wb makin tertindas. Tolong perhatikan nasib guru honor/kontrak jg pak,,karna kami jg sama2 mengajar, , sama seperti yg PNS. Tolong pak,,bpk bs memberikan solusi pd kami. Terimakasih. Wassalamualaikum	10-06-2018 14:06	Njih Terimakasih laporannya diteruskan ke bidang yang menangani Njih terimakasih Masukannya, perlu kami sampaikan bahwa: 1. Gaji Ke 13 dan 14 aturannya adalah Peraturan Pemerintah, Jadi menyeluruh seluruh PNS. 2. Untuk Guru Honor/Kontrak, tergantung dari anggaran, berapa bulan dianggarkan olh masing-masing SKPD/ Kab/Kota 3. Mohon maaf sebelumnya, dikarenakan Aturan hukum dan keterbatasan anggaran, sehingga belum dapat memberikan kesejahteraan, Semoga Kedepan dapat memberikannya. Terimakasih	Laporan Selesai

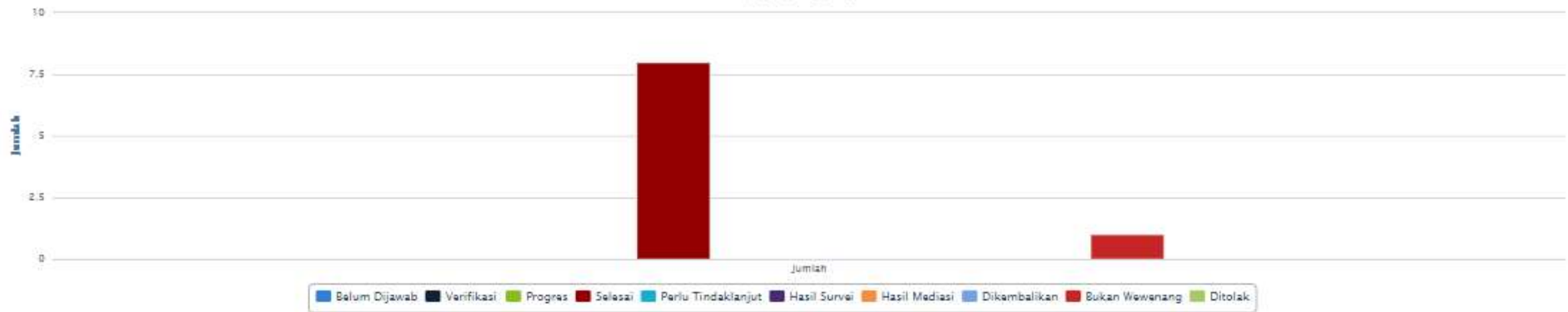
33	smslaporgub (+6288xxxxxxx)	Booz kok iki ono pegawai sing mudik pakai mobil kantor entuk to booz?	13-06-2018 15:00	Terimakasih laporannya diteruskan ke bidang yang menangani Terimakasih Laporannya, mohon bisa di lengkapi data No Mobil, mungkin Foto bisa dikirim ke bkd@jatengprov.go.id atau WA 08112777346, Sebagaimana aturan Kendaraan Dinas tidak diperkenankan dibawa mudik, namun ada beberapa Instansi yang digunakan sebagai Operasional, Untuk Kendaraan Dinas Provinsi Jawa Tengah Dari data yg kami dapat sudah dikandangan di Poll Kantor masing-masing Sesuai Perintah Bp. Plt Gubernur melalui Surat Bapat Sekretaris Daerah.     terimakasih masukannya	Laporan Selesai
----	-------------------------------	---	---------------------	---	-----------------

34	Bagas SW (bagasxxxxxxxx)	<p>Kepada Plt Gubernur Jateng Semarang Kami melaporkan masa jabatan Pj. Sekda Kota Semarang melampaui batas 3 bulan, sesuai yang diamanahkan oleh Perpres Nomor 3 tahun 2018. Terhitung mulai tanggal 8 Januari 2018 Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Semarang Adi Trihananto diberhentikan dari jabatannya dan menduduki jabatan baru sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Semarang. Sebagai pengganti Sekda, Agus Riyanto yang saat ini sebagai Kepala Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Semarang dipilih menjadi Penjabat (Pj) Sekda Kota Semarang. Dengan dikeluarkan peraturan baru untuk melaksanakan ketentuan Pasal 214 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada 2 Februari 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Masa jabatan Pj Sekda Kota Semarang yang seharusnya berakhir awal April 2018 atau lebih dari 3 bulan dinilai telah melanggar Perpres. "Masa jabatan Pj Sekda telah diatur Perpres Nomor 3 tentang Penjabat Sekretaris Daerah. Dengan diberhENTIKANNYA Sekda definitif sesuai pasal 3 ayat (1) Kekosongan sekretaris daerah terjadi karena sekretaris daerah: a. diberhentikan dari jabatannya. dan paling lama 3 (tiga)</p>	22-06-2018 16:48	Njih kami coba koordinasikan dg bidang yg menanganinijih terimakasih, sudah teruskan ke BKD Kota Semarang untuk ditindak lanjuti	Laporan Selesai
----	-----------------------------	---	---------------------	--	--------------------

35	smslaporgub (+6281xxxxxxx)	Assalamualaikum. Mohon ijin, saya Toyib Kepala Desa Sidamulya Kec. Wanareja Kab. Cilacap. Saya sampaikan selamat atas kemenangan Bapak dan Gus Taj Yasin dlm pilgub jateng versi QC. semoga Jateng tambah gayeng utk 5 thn kedepan. aamiin. Saya usul semua pegawai dlm seminggu hari kerja, 1 hari wajib memakai pakaian kas jawa utk nguri uri adat dan budaya jawa. Tadi di TPS 6 desa Sidamulya KPPS nya memakai seragam pakaian jawa. Kami adalah desa yg paling ujung barat berbatasan langsung dgn Jabar, namun Alhamdulillah adat dan budaya jawa sebisa mungkin kami pertahankan. Saya ingin di Desa ada seperangkat gamelan namun sampai hari ini belum bisa terwujud. Jika Bapak berkenan bisa memberikan bantuan gamelan utk masyarakat desa saya. terima kasih.	27-06-2018 17:54	cc ke disdikbud aja mengenai bantuan gamelannya	Laporan Bukan Wewena ng
----	-------------------------------	--	---------------------	---	----------------------------------

### Grafik Berdasarkan Status Pelaporan 2018

Source: laporgub.jatengprov.go.id



No.	Status Laporan	Jumlah
1	Belum Dijawab	0
2	Verifikasi	0
3	Progres	0
4	Selesai	8
5	Perlu Tindaklanjuti	0
6	Hasil Survei	0
7	Hasil Mediasi	0
8	Dikembalikan	0
9	Bukan Wewenang	1
10	Ditolak	0
<b>Total</b>		<b>9</b>